

Kiprah Ulama dalam Politik Pada Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia (1942-1945)

Eva Syarifah Wardah

(Dosen Fakultas Tarbiyah dan Adab IAIN SMH Banten)

Abstrak:

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan umat Islam, karena keterlibatan umat Islam Indonesia sangat mewarnai gerak langkah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Salah satu basis kekuatan politik Islam di Indonesia adalah pesantren yang dipimpin oleh kaum ulama, di mana ulama mendapat kedudukan terhormat dalam masyarakat Indonesia. Sebagai pemimpin umat Islam ia memiliki kepribadian yang tinggi dan mulia tidak saja dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam kemasyarakatan. Pada masa penjajahan ketika ulama berhadapan dengan realitas penjajahan, pemikiran keagamaan menuntutnya berperan lebih dari sekedar pemimpin serta pembina pesantren saja. hakekatnya ia adalah pemimpin dari sebuah komunitas spritual Islam yang kokoh.

Pada masa pendudukan Jepang terjadi perubahan pada posisi dan peran ulama. Jika pada masa kolonial belanda yang dijadikan elit kekuasaan dalam pemerintahan adalah kelompok priyayi (birokrat), maka pemerintahan Jepang memposisikan ulama sebagai tangan-tangannya. Fakta sejarah menjelaskan bagaimana perbitungan Jepang terhadap kepemimpinan informal Kyai (ulama) ditujukan pada pemilihan K.H. Hasyim Asy'ari sebagai pejabat Shumubu (KUA), posisi ulama dalam Peta, partisipasi dalam Cou Sang in (Dewan Penasehat), pendirian Masyumi, dibentuknya Hizbullah dsb. Dengan kata lain Jepang tidak mengabaikan posisi ulama kendati harus dipahami dengan ekspansi Dai Nipon

Kata Kunci: *Ulama, Politik, Pendudukan Jepang*

Pendahuluan

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan tidak terlepas dari sejarah perjuangan umat Islam, karena keterlibatan umat Islam Indonesia sangat mewarnai gerak langkah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Salah satu basis kekuatan politik Islam di Indonesia adalah pesantren yang dipimpin oleh kaum ulama, di mana ulama mendapat kedudukan terhormat dalam masyarakat. Sebagai pemimpin umat Islam, ia memiliki integritas kepribadian yang inggi dan mulia tida saaja di bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang kemasyarakatan. Karena itu kaitan ulama dengan perubahan sosial harus dilihat pada perubahan kepemimpinan ulama, perubahan ulama tentang masalah sosial dan keagamaan yang dialami umat.¹

Pada masa pergerakan nasional, ketika ulama berhadapan dengan realitas penjajahan, pemikiran keagamaan menuntutnya berperan lebih sekedar guru mengaji. Hakekatnya ia adalah pemimpin dari sebuah komunitas spritual Islam yang kokoh, tampilnya rezim kekuasaan penjajah dengan sendirinya mengancam keutuhan itu.

Sebagaimana dikemukakan Kahin, seorang ahli terkemuka tentang awal nasionalisme dan revolusi Indonesia² bahwa Islam tidak hanya ikatan berama, melainkan sesungguhnya semacam lambang dari golongan penentang penjajah. Hal ini dibuktikan oleh fakta sejarah mengenai penentangan dan perlawanan secara besar-besaran yang digerakan oleh para santri dan ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia selama hampir empat abad jaman penjajahan.

Pada masa akhir pemerintah Hindia Belanda kesemarakan pergerakan nasional mulai surut bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda dunia serta tindakan keras dari pemerintah Belanda dan berakibat sangat buruk bagi bangsa Indonesia, baik dalam segi sosial, ekonomi, maupun dalam kehidupan politik. Maka dari itu perjuangan melawan kolonialisme dan imperoalisme tidak lagi dilakukan secara mutlak bersikap non-kooperasi, melainkan mengambil sikap kooperasi dengan pemerintah kolonial dengan tuntutan Indonesia berparlemen. Aktivitas parlementerlah satu-satunya jalan yang ditempuh

¹ Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987), hal 2.

² George MC Turman Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, (Malayasia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1952), hal 38.

untuk menghadapi pemerintah yang sudah berada diambang kehancuran, lebih-lebih setelah negeri Belanda diduduki Jerman pada bulan mei 1940.

Kehadiran Jepang di Indonesia telah berhasil menduduki tempat-tempat terpenting yang semula dikuasai Belanda. Penyerahan Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang 8 maret 1942, maka berakhirilah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Sejak itu pula kekuasaan Jepang secara resmi di Indonesia, sekarang Indonesia memasuki periode baru yaitu periode pendudukan militer Jepang.

Sebagian rakyat Indonesia, khususnya di pulau Jawa menyambut baik atas kehadiran Jepang. Apalagi Jepang menggunakan pendekatan manusiawi lewat propaganda yang mampu menembus kebencian terhadap kolonialisme pada umumnya. Pidato penguasa Jepang mengena dalam hati sanubari bangsa Indonesia bahwa Jepang merasa bertanggung jawab untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda, Indonesia akan dimasukkan dalam kesemakmuran bersama Asia Timur Raya dibawah Jepang.³ Di samping itu, kebencian rakyat Indonesia terhadap kolonial Belanda semakin memperlemah kedudukan Hindia Belanda di Indonesia.

Pendekatan Jepang terhadap umat Islam terealisasi dalam kebijakan politiknya yang memberi ruang gerak lebih leluasa untuk umat Islam untuk turut serta secara langsung dalam politik dan latihan militer.⁴ Jepang mendorong dan memberi prioritas dengan mendirikan organisasi sendiri, sedangkan organisasi kalangan nasionalis yang netral agama tidak digalakan. Seperti halnya pada tanggal 10 September 1943 pemerintah Jepang menghidupkan kembali organisasi Muhammadiyah dan NU, disusul berdiri Perserikatan Umat Islam (PUI) di Majalengka dan Sukabumi. Sedangkan organisasi Taman Siswa yang berorientasi dalam pendidikan dibatasi ruang geraknya.⁵ Hal ini tidaklah berarti selalu mengikuti kepada Jepang, banyak hal-hal yang diperaktekan Jepang berlawanan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini menjadikan sebagian tokoh Islam menarik diri kerjasama dengan Jepang, sehingga muncul pemberontakan yang dipimpin oleh ulama, seperti yang terjadi di

³ Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional; dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hal 120.

⁴ A.Syafii Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hal 21.

⁵ Deliar Noer, *Partai Islam Dipentas Nasional* (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1987), hal 23.

Singaparna (Tasikmalaya) dipimpin oleh Kyai Zaenal Mustofa, kemudian disusul Indramayu, Aceh, dan Blitar.⁶

Masa menjelang kemerdekaan Indonesia, pihak pemuda Islam juga tidak mau ketinggalan. Mereka juga merasa memiliki kewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dalam rapat pemuda Islam di Jakarta 21 Oktober 1944 diambil keputusan untuk menyusun mosi yang diajukan kepada Jepang. Di samping itu akhir pebruari 1945 diadakan latihan Hizbullah sebanyak 500 orang salah satu organisasi semi militer yang dibentuk Jepang sebagai cadangan tentara Peta. Sejak berdirinya *Hizbullah* ditunjukkan dalam ragka partisipasi umat Islam dalam membantu perang Asia Timur raya Jepang yang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi pada akhirnya tentara *Hizbullah* sangat aktif dalam usaha perebutan senjata dari Jepang sebagai modal perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian barisan tentara *Hizbullah* merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah pergerakan Islam di Indonesia. Bersama para pejuang lainnya, baik yang tergabung dalam Peta maupun badan kelasykaran turut berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan para ulama dan Kyai sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Politik Jepang Terhadap Umat Islam Indonesia

Masa pendudukan Jepang kendatipun singkat dapat dicatat sebagai periode pembuka kembali ketertiban Islam dalam dunia politik. Sumbangan terbesar Jepang bagi politik Indonesia terletak pada upaya untuk menyatukan berbagai kekuatan Islam dalam sebuah organisasi Islam Majelis Syuro Indonesia (Masyumi) serta memberi ruang gerak kepada pemimpin-pemimpin Islam untuk turut serta dalam pemerintahan.

Perubahan pandangan pemerintah pendudukan Jepang terhadap elit nasionalis pada awal tahun 1940-an mempunyai dampak membaiknya kedudukan kalangan Islam. Propaganda nasionalisme Indonesia yang semula mendapat dukungan pemerintah menderita pasang surut sampai ada janji Nippon untuk kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu posisi Jepang pada perang pasifik semakin defensif, maka tidak diragukan lagi

⁶ AH. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid I* (Bandung: Angkasa, 1977), hal 112

perlunya mempersiapkan tenaga besar-besaran dalam menghadapi perang. Dan itu tidak lain bagi Jepang harus memperoleh dukungan sebesar mungkin dari rakyat, dimana kaum nasionalis pada saat itu belumlah mendapat dukungan di tingkat rakyat pedesaan bahkan jauh jika dibandingkan dengan Islam.

Dalam menghadapi umat Islam, pemerintah Jepang sebenarnya mempunyai kebijakan politik sama dengan Belanda, hanya dalam awal pendekatannya Jepang memperlihatkan sikap bersahabat. Karena Jepang berkeyakinan umat Islam merupakan kekuatan yang paling besar dalam menghadapi sekutu. Latar belakang sejarah Umat Islam Indonesia yang anti Imperialisme Barat dipandang memiliki kesamaan tujuan dengan Perang Asia Timur Raya Jepang. Sikap umat Islam yang demikian itu akan dimanfaatkan oleh Jepang.

Sebagaimana diketahui bahwa umat Islam sangat menolak (anti) Kolonialisme baik yang dikembangkan oleh Belanda sebelumnya maupun dilancarkan oleh Jepang. Oleh karena itu untuk mencegah timbulnya gerakan politik anti kolonial yang melarang segala bentuk pertemuan, pergerakan, anjuran atau propoganda mengenai peraturan dan susunan negara serta melarang semua rapat dan berbagai kegiatan politik. Bahkan pada tanggal 20 maret 1942 dikeluarkan pula peraturan untuk membubarkan semua perkumpulan terkecuali yang sipatnya hiburan (pelesiran, senang-senang, olah raga, kesenian, drama dan sebagainya yang tidak bermuatan politik) dengan syarat para pemimpinnya harus mohon ijin dan bersumpah tidak akan menjalankan aksi-aksi politik.⁷

Dalam upaya membangun dan mempertahankan kekuasaannya serta keberadaan di dunia internasional, jepang mengalihkan perhatiannya pada kalangan Islam, persamaan idiologi menentang kekuasaan Barat akan dimanfaatkan jepang untuk mencoba mengadakan kerja sama dalam menentang Barat (Belanda). Lebih penting lagi bagi Jepang bahwa Jepang akan memanfaatkan potensi umat Islam yang sangat banyak serta mempunyai kemampuan mobilisasi yang tinggi.

Berbeda dengan politik netral yang dikembangkan penguasa sebelumnya (Belanda), penguasa Jepang berusaha membujuk para pemimpin umat Islam untuk bersedia bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang. Mereka menyebut dirinya sebagai "saudara tua" rakyat

⁷ CST Kansil dan Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan ndonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1982), hal 41.

Indonesia. Ditempuhnya politik semacam ini terutama bertujuan untuk memobilisasikan seluruh penduduk dalam rangka mendukung tujuan-tujuan perang yang cepat dan mendesak. Maka dalam konteks sosio-politik dan militer seperti inilah mengapa Jepang membiarkan organisasi Islam MIAI tetep hidup, karena umat amat dibutuhkannya suatu kebijaksanaan yang sangat dipahami, karena umat Islam telah teramat benci dan lelah berada dalam kekuasaan kolonial Belanda.⁸

Akan tetapi pemerintah Jepang tidak menghendaki parpol Islam, mereka lebih menyukai hubungan langsung dengan ulama daripada dengan pemimpin parpol. Oleh karena itu Jepang segera mengeluarkan maklumat untuk secepatnya pembuburan parpol.⁹

Tindakan Jepang tersebut jelas tidak menghendaki rasa takutnya terhadap Islam sebagai partai politik. Akan tetapi di satu pihak Jepang menyadari akan potensi umat Islam dalam menunjang tujuan perang Jepang. Sekalipun Jepang tidak menyetujui dan menyukai berhubungan dengan pemimpin parpol Islam, namun Jepang memerlukan ulama untuk membentuk wadah organisasi baru guna membina para ulama dan umat Islam. Untuk tujuan tersebut Jepang segera membentuk Kantor Urusan Agama (*Shumubu*) sebagai pengganti kantor *Voor Het Inlansvbe Zaken* masa Belanda. Kemudian *Shumubu* tersebut dikembangkan dan dibentuk cabang-cabangnya disetiap daerah, propinsi, dan kabupaten. Melalui cara inilah diharapkan para tokoh agama mau menduduki jabatan pada tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Orang yang pertama menduduki jabatan pada tingkat pusat adalah Husen Djayadiningrat. Beliau ditempatkan pada pucuk pemerintahan sedangkan K.H Wahid Hasyim dan K.H Mas Mansur dijadikan sebagai sarana untuk mengadakan komtrak langsung dengan para pemimpin Islam dan masyarakat yang ada didaerah. Hal ini dapat dilihat ketika *shumubu* melaksanakan tugas dalam rangka menjalankan program pemerintah jepang., yaitu ketika tanggal 7 desember 1945 tiga puluh dua orang ulama dariseluruh jawa diberi penghormatan dalam sebuah resepsi oleh panglima tertinggi di istana gubernur di Batavia, suatu usaha yang sudah diperhitungkan secara cerdas untuk memberikan kesan kepada para pemimpin agama ini tentang martabatnya serta tentang pengakuannya para pengusaha militer

⁸ A.Syafii Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hal 20.

⁹ Harry J Benda, *Blan Sabit dan Matabari Terbit; Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), hal 142.

terhadap kedudukannya yang penting. Pertemuan tersebut tidak pernah terjadi dan tidak pernah terpikirkan di masa pemerintahan Belanda, diatur oleh *shumubu*, tanpa MIAI diambil sebagai perantara.¹⁰

Untuk menarik kembali simpati umat Islam selain mengadakan propaganda yang gencar, Jepang membentuk persiapan umat Islam yang merupakan ranting dari gerakan 3 A. persiapan umat Islam ini diketuai oleh Abikusno Tjokrosuyoso, salah seorang elit Islam dari golongan PSII. Tujuan Jepang mengadakan organisasi ini untuk menggantikan posisi MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) atau majelis Islam luhur yang dianggap pemerintah militer anti kolonialisme. Karena itu, maka Jepang menganggap pula MIAI anti Jepang. Tetapi upaya ini mengalami ketidak berhasilan, karena Abikusno merasa kesulitan untuk mempersatukan umat Islam Jawa. Ketika diadakan pertemuan antar tokoh agama di Jakarta, yang dihadiri oleh beberapa utusan dari seluruh Jawa, mayoritas mereka tetap menginginkan ka beradaan MIAI.

Melihat kenyataan yang ada, akhirnya pemerintah Jepang mengambil alternatif kebijaksanaan lain, yaitu membolehkan MIAI dalam beraktifitas asal dalam kegiatannya tidak bermuatan politik, serta mendapat pengawasan yang ketat dari pemerintah Jepang. Kendatipun demikian, keberadaan kembali MIAI kurang dapat perhatian dari dua organisasi penyokong utama yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hal ini disebabkan karena terjadi perselisihan paham dalam kongres, maka dari itu akhirnya MIAI mengalami kemerosotan dan pada akhirnya bubar.

Karena keadaan perang Jepang semakin memburuk dan semakin terpuruk, sementara organisasi bentukan Jepang yang diharapkan bisa membentuk belum juga tampak, maka pada akhirnya Jepang mengambil inisiatip untuk mengambil sebuah wadah yang dilengkapi dengan latihan militer dengan tujuan untuk menciptakan pasukan sukarelawan. Pasukan itu diberi nama PETA (*Pembela Tanah Air*) Organisasi tersebut akhirnya di bentuk pada tanggal 3 November 1943.

Untuk mendapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat Indonesia pada umumnya lebih khusus umat Islam. Jepang memperlalat pemimpin Islam. Mereka ditugasi untuk memobilisasi masa agar membantu Jepang tidak hanya digaris belakang tetapi di front depan dalam medan perang. Ternyata program Jepang yang satu ini cukup

¹⁰ Ibid, hal 150

berhasil berbondong-bondonglah umat Islam mendaftarkan diri. Hampir seluruh Jawa dipenuhi oleh sukarelawan. Seperti yang sudah disinyalir Benda, bahwa korps perwira Indonesia yang berlatih mulai akhir bulan Oktober 1943, meliputi jumlah kiai yang sangat besar.

Untuk mengimbangi kekuatan kaum nasionalis yang pada saat itu, mendirikan Berisan pelopor dengan keanggotaan berasal dari *Jawa Hokokai-Jepang* memberikan izin kepada kaum muslimin Jawa untuk mendirikan *Hiszbollah* pada tahun 1944.

Selanjutnya amat menarik unruk melihat perkembangan selama pendudukan Jepang kesimpulan yang dianjurkan Benda bahwa untuk beberapa waktu dalam kenyataan Jepang lebih suka memberi berbagai konsensi-konsensi kepada tuntutan umat Islam daripada kaum nasionalis, apalagi priyayi, hanyalah pada akhir masa pendudukan konsnesi-konsensi kepada elit Islam diimbangi dan akhirnya menjadi tidak penting lagi dengan adanya dukungan yang semakin meningkat dan menentukan kepada kaum nasionalis. Meskipun demikian Islam merupakan kekuatan tersendiri dalam percaturan politik di Indonesia karena sejarah keberadaannya yang panjang selama berabad lamanya dan besarnya penganut agama ini. Menghadapi situasi yang menegangkan menjelang kemerdekaan Indonesia berbagai kelompok Islam, terlihat cukup eksis dalam kancah pergumulan untuk memperjuangkan cita-cita politik mereka. Walaupun secara formal tujuan organisasi mereka menekankan pada kegiatan keagamaan dan sosial. Kemerdekaan Indonesia yang semakin dekat karena memang dijanjikan oleh pemerintah Jepang, melibatkan semua kekuatan yang ada untuk mencari penyelesaian dasar-dasar negara yang akan ditegakan di bumi nusantara ini.

Reaksi Ulama Terhadap Kebijakan Politik Pemerintah Pendudukan Jepang

Serentetan kemenangan Jepang yang cepat di ASIA Tenggara berpuncak dengan kemenangan dahsyat telah memberikan kesan mendalam bagi pemimpin-pemimpin Indonesia. Pada mulanya kedatangan bala tentara Jepang disambut dengan gembira oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi kegembiraan itu pun segera berubah menjadi kebencian setelah diketahui bahwa Jepang tidak lebih baik dari Belanda, bahkan mereka lebih kejam dan tidak segan-segan menghukun rakyat Indonesia yang dianggap menentang.

Semula para pemimpin organisasi Islam pun menyambut dengan ramah, mereka berharap kedatangan Jepang akan bisa memberi kelonggaran dalam mengurus soal-soal keislaman terutama soal dakwah Islam. Namun harapan itu juga segera lenyap, sebab seminggu setelah menguasai Indonesia kolonel Horie berpidato dan menyatakan bahwa dirinya telah diangkat oleh pemerintah Jepang menjadi Kepala Kantor Urusan Agama (*shumubu*). Kolonel Horie juga menjelaskan bahwa ia akan segera menjelaskan tugasnya mengurus tempat-tempat ibadah, mempelajari masalah-masalah Islam baik dari segi hukum, budaya maupun aktifitas keagamaan lainnya. Selain itu dikatakan juga bahwa *shumubu* berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Jepang. Oleh karena itu *shumubu* harus setia dan menuruti kemauan pemerintah Jepang yang sedang berkuasa.¹¹

Pada masa awal pendudukannya di Indonesia khususnya di pulau Jawa, propaganda Jepang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa Barat (Belanda) terus menerus dilancarkan guna mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Tampaknya Jepang mengetahui potensi rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam dan mempunyai tradisi memusuhi Barat. Maka dari itu tidak segan-segan Jepang merekrut ulama dan para santrinya diseluruh Jawa guna memanfaatkan semangat yang ada pada setiap umat Islam Indonesia yang anti terhadap Barat. Di mana selama tahun-tahun terakhir kekuasaan Belanda, kondisi sosial politik akibat tekanan pihak pemerintah kolonial semakin keras dirasakan, inilah salah satu sebab para pemimpin Islam menunjukkan sikap simpati terhadap kedatangan pasukan Jepang.

Pemerintah Jepang melihat perkembangan Islam Indonesia terdiri dari dua bagian. Pertama kegiatan politik yang menguasai kehidupan umat Islam yang berada di kota, sedangkan sebagian besar para ulama yang tinggal di desa. Kalangan ulama terakhir inilah digambarkan sebagai ulama yang jauh dari analisis politik. Oleh karena itu Jepang akan dapat memanfaatkan potensi ulama desa ini asal mereka dijauhkan dari konsepsi politik dan parpol Islam. Dengan kata lain pemerintah Jepang akan sangat merasa aman dengan membina hubungan militernya dengan ulama yang tidak turut campur dalam urusan politik. Mayor Jendral Okazaki lebih menekankan perhatiannya kepada ulama

¹¹ Choirul Anam, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Solo: Jatayu, 1985), hal 113.

dari pada Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Maka untuk berhubungan langsung dengan ulama tersebut digunakan *Shumubu* (Kantor Urusan Agama) sebagai penggerakannya.¹²

Upaya pemerintah Jepang dalam mempolitisir rakyat Islam di pedesaan, pada tanggal 1 Juli 1943 kursus latihan pertama untuk kiai dan ulama dalam satu upacara yang mengesankan oleh Kolonel Kawasaki yang mewakili *Gunseikan*, Kolonel Horie kepala *Shumubu* dan pemimpin latihan tersebut mengumumkan kepada para kiai bahwa tujuan latihan itu adalah :

“Memperkuat pengertian saudara-saudara tentang situasi dunia dan untuk meningkatkan semangat saudara-saudara sehingga saudara mampu memberikan dukungan yang sebesar-besarnya bagi pemerintah”.¹³

Sebenarnya pendekatan Jepang terhadap Islam tidak hanya berlangsung pada saat pendudukan, namun jauh pada masa sebelumnya. Tentu hal ini berdasarkan penelitian Jepang setelah mereka melihat sikap politik umat Islam yang tidak pernah damai dengan penjajah (Barat). Adapun setelah pendudukan, praktek pendekatan terhadap ulama sangat mengejutkan tidak hanya bagi kalangan nasionalis sekular, tetapi juga kalangan umat Islam sendiri. Tidak lama setelah pendaratan, Angkatan Darat Jepang yang menguasai pulau Jawa, Madura dan Sumatra yang berpusat di Jakarta segera mengeluarkan larangan kegiatan ormas dan parpol. Larangan ini yang terkena adalah Islam. Karena kenyataan dari parpol masih ada adalah partai Serekat Islam Indonesia (PII) sedangkan dari kalangan nasionalis Parinda. Demikian juga terhadap ormas Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Perserikatan Ulama di kenai pembubaran.

Sekalipun demikian diikuti dengan pembentukan persatuan umat Islam yang di pimpin Abikusno Tjokrosujoso merupakan bagian dari gerakan Tiga A, namun umat Islam tidak menaruh simpati terhadap tindakan Jepang. Termasuk K.H Hasyim Asy'ari dari NU menentang pembekuan kegiatan ormas dan parpol Islam tersebut. Oleh karena itu sejak tahun pertama pendudukan Jepang di Jawa, umat Islam sudah

¹² Ahmad Mansyur Suryanegara, *Menemukan Sejarah; Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995), hal 275.

¹³ Harry J Benda, *Blan Sabit dan Matahari Terbit; Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), hal 168.

permusuhan. Sikap ini tidak hanya di perlihatkan oleh para pemimpin organisasi Islam tetapi juga oleh para ulama secara individual yang bergerak secara sendiri-sendiri. Para pemimpin organisasi Islam masih dapat menyatakan bekerjasama dengan Jepang asalkan mereka tidak menghina Islam. Sedangkan dari para ulama individual melahirkan penolakan yang bersifat progresip dan mengarah kepada pemberontakan-pemberontakan.

Semula Jepang berharap bahwa ulama dan umat Islam akan bekerjasama dengan Jepang. Akan tetapi tidaklah semua ulama bersedia bekerjasama dengan pemerintah Jepang, sebab bukan saja Jepang lebih kejam seperti yang tercermin pada sistem *romusha* yang mereka bangun, merampas padi rakyat dengan dalih untuk kepentingan perang serta tindakan *Kem pel tai* (Polisi Militer) yang menganut pukul dahulu urusan belakang. Lebih dari itu yang dikawatirkan oleh para ulama adalah Jepang hendak mengintroduksikan *Shintoisme* dikalangan umat Islam. Perintah berseikeiri yaitu membungkukkan badan kearah Matahari Terbit (Jepang) serta pendewaan terhadap *Tenno Heika* (Kaisar Jepang) adalah satu isu yang hangat dibicarakan dikalangan ulama. Mereka (Ulama) mengetahui bahwa dibalik mulut manis Jepang terselip tujuan yang sebenarnya yakni mengeksploitasi kekuatan Islam untuk kepentingan Jepang.

Pada pertemuan lima puluh sembilan kiai dan ulama dari seluruh Jawa yang diselenggarakan di Bandung pada permulaan tahun 1943. Abdul Karim Amrullah sebagai penasehat *Shumubu* menunjukkan sikap menentang. Sekalipun merupakan hal yang sepele, tetapi menimbulkan katagangan hubungan antar pihak Jepang dan ulama, Abdul Karim Amrullah tidak mau *seikeiri* ruku menghadap kearah Tokyo karena dipandang merubah arah kiblat dari tanah suci ke Jepang.

Suasana memang sangat mendukung untuk berontak, kesengsaraan serta penderitaan rakyat akibat penindasan serta kejaman Jepang sudah melampoi batas perikemanusiaan. Maka inilah sebabnya mengapa timbul pemberontakan-pemberontakan lokal yang lahir atas inisiatif pemuka-pemuka agama seperti yang terjadi di Singaparna (Tasikmalaya), Aceh, Indramayu, dan Blitar.

Di Singaparna (Tasikmalaya) pada tanggal 25 Pebruari 1944 terjadi suatu pemberontakan yang dipimpin Kyai Haji Zainal Mustafa, seorang ulama yang tegas pendiriannya serta memiliki dasar keagamaan dan kebangsaan yang kuat. Beliau tidak bersedia melakukan *seikeiri* yakni memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan

memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan kearah Tokyo. Karena sikapnya tersebut maka hubungan antar Kyai Haji Zainal Mustafa dengan pemerintah Jepang semakin renggang. Beliau telah bertekat melawan Jepang karena sudah tidak tahan melihat kehidupan rakyat yang semakin sengsara. Untuk menghindari segala kemungkinan beliau mempersiapkan murid-muridnya dengan mempertebal keyakinan para santrinya bahkan mengajarkan kemahiran dalam membela diri untuk mempertahankan serangan dari musuh. Melihat itu pemerintahan Jepang merasa khawatir dan sebagai antisipasinya segera mengambil tindakan guna melumpuhkan kekuatan kelompok Kyai Haji Zainal Mustafa tersebut.¹⁴

Kempeitei sebagai organisasi rahasia Jepang setelah mendengar adanya gerakan protes tersebut mencoba melunakan dengan mengirimkan surat panggilan kepada Kyai Haji Zainal Mustafa tetapi panggilan ditolak oleh Kyai Haji Zainal Mustafa. Maka disinilah nampaknya gerakan itu mulai menghadapi detik yang dinantikan. Satu pasukan polisi *Keibodan* dan tentara Jepang datang ke Sukamanah untuk menangkap Kyai Haji Zainal Mustafa. Peristiwa itu terjadi setelah shalat jum'at, banyak dari tentara Jepang yang luka-luka karena persenjataan yang tidak seimbang, maka gerakan protes tersebut dapat dipadamkan dan beliau dihukum mati setelah sebelumnya mendapat siksaan berat dan dikuburka di Ancol. Akan tetapi makam beliau kemudian dipindahkan ke daerah asalnya dan diistirahatkan ditengah-tengah masyarakat yang dibelanya dengan taruhan nyawa.

Meskipun pemberontakan Kyai Haji Zainal Mustafa secara fisik memang sudah diredakan oleh tentara Jepang, namun semangat perlawanan umat Islam belumlah padam bahkan semakin menggelora. Tiga bulan kemudian pada bulan Mei 1944, seorang haji di Karangampel Indramayu bangkit memimpin pemberontakan itu kemudian dapat dilumpuhkan tentara Jepang.

Pada bulan Agustus tahun yang sama pecah lagi pemberontakan di daerah Lohbener serta Sindang Indramayu yang dipimpin oleh Haji Madrias, H. Kartiwa, Kyai Serengseng, Kyai Kusen dan Kyai Mukasan. Munculnya pemberontakan di Indramayu ini disebabkan oleh tekanan Jepang terhadap kewajiban petani untuk menyerahkan pajaknya yang

¹⁴ AH. Nasution, *Sekitar Perang Kemerekaan Indonesia Jilid I* (Bandung: Angkasa, 1977), hal 112

rakyat karena terlalu memberatkan.¹⁵

Di Aceh, setelah Jepang menduduki daerah tersebut, muncul pemberontakan yang dipimpin Kyai Muda Tengku Abdul Jalil, seorang pemimpin dayah di Aceh pada tanggal 10 November 1942.

Selanjutnya pada bulan Pebruari 1945 pecahlah pemberontakan dari organisasi yang diciptakan Jepang sendiri. Pemberontakan itu datang dari barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang berdiri bulan Oktober 1943. Anggota PETA di Blitar merasa tersentuh hatinya setelah sering kali mendengar dan melihat hal-hal yang menyakitkan hati bangsa Indonesia, tidak tahan melihat kesombongan dan kesewenangan Jepang. Bagi para patriot PETA di Blitar yang di pimpin Supriyadi dan dibantu Muradi merasa sudah muak melihatnya. Untuk itu kedua pemimpin tersebut secara terbuka menyampaikan rencana untuk melancarkan pemberontakan terhadap Jepang.

Dalam usaha mengakhiri pemberontakan, pihak Jepang menggunakan cara klasik dari negara-negara kolonial. Mereka menggunakan pasukan-pasukan pribumi untuk menghadapi bangsa sendiri. Sehingga pada akhirnya pemberontakan dapat dihentikan dan seluruh yang terlibat dapat diamankan. Dari semua yang terlibat berjumlah 55 orang. Mereka mendapat vonis yang beragam, hukuman tersebut ada yang hanya terkena pidana selama 2 tahun, tetapi ada pula yang mendapat hukuman mati. Sedangkan pemimpin utam dari pemberontakan ini (Supriyadi) tidak diketahui nasibnya, namun kebanyakan orang menduga beliau mati saat menerima siksaan pada introgasi.

Ternyata kepeloporan Kyai Haji Zainal Mustafa dalam memimpin gerakan protes pesantren Sukamanah tersebut telah mengilhami serta membangkitkan para ulama lainnya untuk melancarkan perlawanan bersenjata dan menyalakan keberanian tentara PETA bersama ulama Blitar untuk melancarkan pemberontakan terhadap Jepang. Dari gerakan protes pesantren Sukamanah yang diikuti oleh Lohbener, Indramayu, Aceh, Blitar dan Kaplongan Cirebon memaksa pemerintah Jepang untuk mengumumkan janji Kemerdekaan Indonesia serta memaksa Perdana Menteri Kaiso pada sidang istimewa *Taikoku Gikai* ke-85 pada tanggal 7 September 1944 menjawab untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak dikemudian hari.

¹⁵ Ibid, hal 126.

memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak dikemudian hari.

Selain perlawanan dari ulama individu yang bergerak secara sendiri-sendiri dipedesaan, perlawanan kaum muslimin yang duduk pada pucuk pemimpin juga mengadakan perlawanan secara moderat. K.H Mansur, secara tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa umat Islam hanya dapat bekerja sama dengan Jepang asalkan pemerintah Jepang tidak menghina Islam. Dan jika Islam terhina, umat Islam akan bangkit membelanya. Kemudian K.H Hasyim Asy'ari, seorang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) mengingatkan bahwa umat Islam jangan sampai terlalu percaya kepada pemimpin kafir termasuk Jepang.

Dua nama pemilik Islam yang kharismatik tadi pada mulanya dijadikan Jepang sebagai alat propaganda andalan Jepang, akan tetapi pada akhirnya dengan cara diplomasi berhasil memalingkan tujuan Jepang yang sebenarnya. Demikian reaksi ulama terhadap kebijakan politik Islam Jepang, baik ulama tradisional maupun ulama modern dalam kancah politik Jepang, mereka sangat menentukan nasib umat Islam dikemudian hari.

Penutup

Peran ulama dalam melawan penjajah sangat besar, hal ini dapat dilihat dari reaksi terhadap peristiwa yang menggemparkan pada tahun-tahun terakhir pemerintah Hindia Belanda tentang rencana pembuatan Undang-undang Perkawinan yang dipandang sebagai campur tangan pemerintah kolonial terhadap agama Islam. Oleh karena itu muncul protes-protes umat Islam, di mana pemimpin-pemimpin Islam bersepakat untuk bersatu, akhirnya sampai pada titik dimana ulama-ulama bersama-sama mendukung dibentuknya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI).

Pada masa pendudukan Jepang, ulama diikutsertakan dalam kepemimpinan dan pemerintahan, akan tetapi tidak semua ulama bersedia bekerja sama dengan Jepang, sebab bukan saja Jepang lebih kejam dari Belanda. Lebih dari itu yang dikhawatirkan oleh ulama adalah Jepang hendak mengintroduksikan *shintohisme* di kalangan umat Islam, sehingga muncul pemberontakan-pemberontakan yang lahir atas inisiatif pemuka-pemuka agama seperti yang terjadi di Singaparna (Tasikmalaya), Indramayu, Aceh, dan Blitar.

Daftar Pustaka

- Anam, Choirul. 1985. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Solo, Jatayu
- Benda, Harry J. 1985. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit ; Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta, Pustaka Jaya.
- Harikoshi, Hiroko. 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta P3M.
- Kansil, CST dan Julianto. 1982. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta, Erlangga.
- Ma'arif, A. Syafii. 1988. *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*. Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Press.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam Dipentas Nasional*. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Nasotion, AH. 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia ; Jilid 1 Proklamasi*. Bandung, Angkasa.
- Notosusanto, Nugroho dan Marwati Djonet Poesponegoro. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Pringgogidgo, AK. 1991. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta, Dian Rakyat.
- Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional; dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 1995. *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta, LP3ES.
- Suminto, Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta, LP3ES
- Rahardjo, M. Dawam. 1985. *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari bawah*. Jakarta, P3M.
- Zuhri, Saifuddin. 1981. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangan di Indonesia* Bandung, Al Ma'arif